

Analisis Tingkat Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan KSPPS Syirkah FK Jawa Timur terhadap SAK Entitas Privat Tahun 2025

Titin Umila

Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail: titinumila42@gmail.com

Article History:

Received: 02 Oktober 2026

Revised: 14 Oktober 2026

Accepted: 16 Oktober 2026

Keywords: *rahn tasjili, pembiayaan bermasalah, koperasi syariah, manajemen risiko, prinsip syariah*

Abstract: *Skema pembiayaan Rahn Tasjili merupakan salah satu akad gadai yang banyak diterapkan pada koperasi syariah karena memiliki prosedur yang praktis, cepat, dan mudah diakses oleh anggota. Meskipun demikian, pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola agar tidak mengganggu stabilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili tanpa mengungkapkan data nominal maupun persentase internal lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus pada salah satu koperasi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan dilakukan melalui analisis kelayakan calon anggota, verifikasi dokumen, penilaian agunan, dan edukasi akad sebelum pencairan. Sementara itu, penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pengawasan pascaakad, pendekatan persuasif, restrukturisasi administrasi, serta penyelesaian berbasis musyawarah. Hasil penelitian ini penting sebagai acuan bagi koperasi syariah dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan Rahn Tasjili secara efektif dan sesuai prinsip syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan tersebut, khususnya bagi masyarakat mikro dan kecil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan formal. KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis anggota yang mengedepankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan bagi hasil (Sodiq, 2025).

Dalam menjalankan fungsinya, KSPPS mengelola dana anggota yang menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai media utama dalam menilai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mengevaluasi kinerja pengurus serta menentukan arah kebijakan koperasi (Lewar et al., 2025). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi aspek fundamental dalam tata kelola koperasi.

Secara konseptual, kualitas laporan keuangan ditentukan oleh karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yaitu relevansi, representasi yang tepat, keterbandingan, keterpahaman, dan keterverifikasian. Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), organisasi cenderung mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan sebagai bentuk legitimasi serta upaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat dijadikan indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan suatu entitas (Aisyah, 2023; Hidayat, 2024).

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, termasuk koperasi. SAK EP merupakan penyederhanaan standar akuntansi sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan sekaligus mempermudah implementasi di entitas privat. Standar ini mengatur penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2024).

Perubahan standar ini memberikan implikasi penting bagi koperasi, termasuk KSPPS, yang harus menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporannya. Namun demikian, implementasi standar akuntansi baru masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan (Rahmawati, 2024; Rosyidah, 2025). Selain itu, praktik pencatatan manual yang masih digunakan pada sebagian koperasi juga turut memengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan koperasi telah disusun secara relatif lengkap, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengungkapan informasi. Aisyah (2023) menemukan bahwa sebagian besar koperasi syariah belum optimal dalam pengungkapan kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Hidayat (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan koperasi terhadap standar akuntansi berada pada kategori cukup patuh dengan tingkat kepatuhan sekitar 72%. Sementara itu, Rahmawati (2024) menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan komitmen pengurus memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi. Temuan ini diperkuat oleh Hariza et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pada koperasi syariah masih belum sepenuhnya konsisten terutama pada aspek pengungkapan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada SAK ETAP atau PSAK Syariah sebagai dasar evaluasi. Kajian yang secara spesifik membahas implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) masih sangat terbatas, mengingat standar ini mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2025 (Lutfillah & Syahida, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang mengukur tingkat kepatuhan penyajian

laporan keuangan koperasi syariah terhadap SAK EP secara empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur terhadap SAK EP tahun 2025 serta mengidentifikasi komponen laporan keuangan yang telah sesuai maupun yang masih memerlukan penyempurnaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi koperasi syariah dan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan koperasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) tahun 2025 secara sistematis berdasarkan data numerik tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data angka yang menggambarkan kondisi aktual suatu objek penelitian. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam penelitian kepatuhan akuntansi karena memungkinkan pengukuran tingkat kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena berfokus pada satu entitas, yaitu KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan metode yang tepat untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur tahun 2025 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan manajer koperasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahun 2025, dokumen kebijakan akuntansi, CALK, serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau pihak perantara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi dokumen. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan keuangan, wawancara untuk memperoleh informasi implementasi kebijakan akuntansi, dan observasi untuk mencocokkan kesesuaian praktik dengan standar SAK EP.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar checklist kepatuhan (compliance checklist) berdasarkan ketentuan SAK EP. Checklist ini digunakan untuk menilai kesesuaian setiap item standar dengan penyajian laporan keuangan koperasi, baik dari aspek penyajian, pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan. Analisis data menggunakan metode content analysis dengan pendekatan disclosure index. Setiap item dalam SAK EP dibandingkan dengan laporan keuangan koperasi. Penilaian dilakukan secara dikotomis, yaitu:

Skor 1 = sesuai dengan SAK EP

Skor 0 = tidak sesuai atau tidak diungkapkan

Metode ini mengacu pada pendekatan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cooke (1992), yang banyak digunakan dalam penelitian akuntansi untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaporan keuangan terhadap standar yang berlaku. Tingkat kepatuhan dihitung

menggunakan Indeks Kepatuhan (IK) dengan rumus:

$$IK = \frac{\sum S}{\sum P} \times 100\%$$

Keterangan:

IK = Indeks Kepatuhan

$\sum S$ = Jumlah item yang sesuai (skor 1)

$\sum P$ = Total item yang dipersyaratkan dalam SAK EP

Kriteria interpretasi hasil adalah: 81–100% = sangat patuh, 61–80% = patuh, 41–60% = cukup patuh, 21–40% = kurang patuh, dan 0–20% = tidak patuh. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data agar hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur terhadap SAK EP Tahun 2025

Hasil analisis terhadap laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai indeks kepatuhan sebesar 96,88 persen. Nilai tersebut diperoleh melalui penerapan metode checklist kepatuhan berbasis disclosure index, yang mengoperasionalkan ketentuan SAK EP ke dalam item-item observasi, kemudian dinilai menggunakan skema dikotomis, yaitu skor satu untuk item yang sesuai dan skor nol untuk item yang tidak sesuai, sebelum dihitung sebagai rasio total kesesuaian terhadap total item yang dipersyaratkan (Cooke, 1992; Wallace et al., 1994; Hidayat, 2024).

Pendekatan ini memungkinkan standar akuntansi yang bersifat normatif diterjemahkan menjadi indikator kuantitatif yang terukur, sehingga tingkat kepatuhan tidak hanya dilihat dari keberadaan laporan, tetapi juga dari kesesuaian substansi penyajiannya terhadap ketentuan standar. Dalam konteks ini, nilai 96,88 persen menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan dalam SAK EP telah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pelaporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh komponen utama laporan keuangan telah disajikan secara lengkap, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kelengkapan ini menunjukkan tidak adanya missing item dalam struktur pelaporan, sehingga secara formal laporan keuangan telah memenuhi ketentuan penyajian sebagaimana diatur dalam SAK EP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2024).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya terjadi pada level penyajian laporan secara keseluruhan, tetapi juga pada aspek pengakuan dan pengukuran transaksi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, proses akuntansi di dalam koperasi telah mengikuti tahapan sistematis mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Jika ditinjau dari perspektif kualitas pelaporan keuangan, capaian ini mencerminkan terpenuhinya

karakteristik fundamental informasi akuntansi, khususnya kelengkapan (completeness) dan keterbandingan (comparability). IASB (2018) dalam Conceptual Framework menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus menyajikan seluruh informasi yang relevan secara lengkap agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan.

Dari perspektif teori kepatuhan, tingginya tingkat kepatuhan ini menunjukkan adanya internalisasi standar akuntansi dalam praktik organisasi. Deegan (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk legitimasi organisasi dalam mempertahankan kepercayaan stakeholder. Dalam konteks koperasi, hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas kepada anggota sebagai pemilik utama entitas. Selain itu, perspektif teori institusional juga memberikan penjelasan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan hasil dari tekanan regulatif dan normatif yang mendorong organisasi untuk menyesuaikan praktik pelaporan keuangannya. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi dalam suatu bidang akan cenderung homogen akibat tekanan isomorfisme institusional, baik yang bersifat regulatif, normatif, maupun kognitif. Implementasi SAK EP dalam penelitian ini menunjukkan adanya bentuk penyesuaian terhadap standar akuntansi yang berlaku secara formal.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kecil ketidaksempurnaan yang lebih banyak terletak pada aspek pengungkapan informasi, khususnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang tinggi lebih merefleksikan formal compliance, sementara dimensi qualitative disclosure masih menjadi area yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat kualitas informasi akuntansi secara keseluruhan. Capaian indeks kepatuhan sebesar 96,88 persen menunjukkan bahwa KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur telah berada pada tahap advanced compliance, yaitu kondisi di mana implementasi standar akuntansi telah berjalan sangat baik secara struktural dan teknis, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas pengungkapan agar laporan keuangan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga optimal secara informatif.

Komponen Laporan Keuangan yang Telah Sesuai dengan Ketentuan SAK EP

Hasil analisis terhadap laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh komponen utama laporan keuangan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Kesesuaian tersebut mencakup laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), tanpa adanya komponen yang tidak tersaji dalam struktur pelaporan.

Kelengkapan seluruh komponen ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kekurangan pada aspek struktural pelaporan keuangan, sehingga secara formal laporan telah memenuhi ketentuan penyajian sebagaimana diatur dalam SAK EP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2024). Dalam kerangka pengukuran berbasis checklist kepatuhan, pemenuhan seluruh komponen utama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya skor kepatuhan, khususnya pada dimensi penyajian (presentation dimension) yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian indeks kepatuhan. Jika dikaitkan dengan hasil pengukuran indeks kepatuhan sebesar 96,88 persen pada bagian sebelumnya, terpenuhinya seluruh komponen laporan keuangan ini menjadi faktor dominan yang memperkuat tingkat kesesuaian terhadap standar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar item dalam instrumen penelitian yang berkaitan dengan aspek penyajian laporan keuangan telah terpenuhi secara konsisten, sehingga tidak ditemukan

adanya missing item pada level struktur pelaporan.

Secara konseptual, kesesuaian tersebut mengindikasikan bahwa proses akuntansi dalam koperasi telah berjalan secara sistematis, dimulai dari tahap pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, hingga penyajian laporan keuangan akhir. Proses ini mencerminkan bahwa fungsi akuntansi tidak hanya berperan sebagai mekanisme pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pelaporan yang mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara penuh. Dari perspektif kualitas pelaporan keuangan, kelengkapan seluruh komponen laporan ini menunjukkan terpenuhinya karakteristik fundamental informasi akuntansi, khususnya aspek kelengkapan (completeness) dan keterbandingan (comparability). IASB (2018) dalam Conceptual Framework menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus menyajikan seluruh informasi yang relevan secara lengkap agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam koperasi. Sistem tersebut memungkinkan setiap transaksi keuangan diproses secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar. Hal ini sejalan dengan temuan Lewar et al. (2025) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung keteraturan penyajian laporan keuangan pada koperasi. Selain itu, kesesuaian seluruh komponen laporan keuangan ini juga mencerminkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan telah memadai untuk menerapkan standar akuntansi secara konsisten. Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi pada koperasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam memahami dan menerapkan ketentuan pelaporan keuangan secara tepat.

Meskipun seluruh komponen laporan keuangan telah terpenuhi secara struktural, kondisi ini masih berada pada tingkat formal compliance, yaitu kepatuhan pada aspek keberadaan dan format laporan. Kedalaman informasi dalam setiap komponen, terutama dalam Catatan atas Laporan Keuangan, masih memerlukan penguatan agar tidak hanya memenuhi aspek struktural, tetapi juga meningkatkan kualitas pengungkapan informasi secara substantif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur telah memenuhi seluruh komponen laporan keuangan sesuai SAK EP, yang menjadi salah satu faktor utama dalam tingginya tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi standar telah berjalan dengan baik pada aspek teknis dan struktural, meskipun peningkatan kualitas pengungkapan masih menjadi area pengembangan yang penting.

Keterbatasan Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap SAK EP

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur berada pada kategori sangat tinggi, masih terdapat aspek yang belum sepenuhnya optimal dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Kelemahan tersebut terletak pada dimensi pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), khususnya pada penjelasan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks pengukuran berbasis checklist kepatuhan, kondisi ini tercermin dari adanya beberapa item pengungkapan yang belum terpenuhi secara penuh, sehingga berkontribusi pada selisih kecil dalam indeks kepatuhan yang telah diperoleh sebelumnya sebesar 96,88 persen. Ketidaktepatan tersebut tidak berkaitan dengan tidak tersedianya komponen laporan keuangan, melainkan lebih pada kedalaman informasi yang

disajikan dalam bentuk narasi akuntansi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang rinci terkait kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti dasar pengakuan pendapatan, metode pengukuran aset dan liabilitas, serta perlakuan akuntansi atas transaksi tertentu yang bersifat spesifik pada koperasi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah memenuhi aspek struktural, aspek substantif berupa kualitas pengungkapan masih memerlukan penguatan. Secara normatif, Ikatan Akuntan Indonesia (2024) menegaskan bahwa CALK memiliki peran penting dalam memberikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan secara langsung dalam laporan utama. CALK seharusnya mampu menjelaskan kebijakan akuntansi secara memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dasar penyusunan angka-angka dalam laporan keuangan secara utuh. Ketidaklengkapan dalam aspek ini menunjukkan bahwa fungsi informatif CALK belum berjalan secara optimal.

Dari perspektif kualitas pelaporan keuangan, IASB (2018) dalam Conceptual Framework menekankan bahwa kualitas informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap format laporan, tetapi juga oleh tingkat keterbukaan (transparency), relevansi, dan kemampuan informasi dalam mencerminkan kondisi ekonomi secara wajar. Dalam konteks ini, keterbatasan pengungkapan kebijakan akuntansi menunjukkan bahwa aspek qualitative disclosure belum sepenuhnya terpenuhi. Fenomena ini juga sejalan dengan hasil penelitian Aisyah (2023) yang menemukan bahwa koperasi syariah umumnya telah menyusun laporan keuangan secara lengkap, namun masih memiliki kelemahan pada aspek pengungkapan kebijakan akuntansi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kualitas disclosure yang memadai, terutama pada bagian catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan dalam pengungkapan sering kali dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dalam memahami standar akuntansi secara mendalam, khususnya dalam menyusun narasi kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAK EP. Dalam konteks KSPPS SYIRKAH FK Jawa Timur, kondisi ini dapat dikaitkan dengan masih terbatasnya pendalaman teknis dalam penyusunan CALK. Meskipun secara struktural laporan keuangan telah memenuhi seluruh ketentuan SAK EP, aspek pengungkapan masih menjadi titik lemah utama dalam kualitas pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi SAK EP tidak lagi berada pada tahap pemenuhan komponen laporan, tetapi telah bergeser pada peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Penguatan pada aspek CALK menjadi penting agar laporan keuangan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga memiliki nilai informatif yang lebih tinggi bagi pengguna laporan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan KSPPS SYIRKAH FK JATIM Tahun 2025 telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Berdasarkan 32 indikator penilaian, tingkat kepatuhan mencapai 96,88% dan berada pada kategori sangat patuh. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SAK EP telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pengungkapan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah. (2023). Analisis kepatuhan penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap standar akuntansi. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 112–123.
- Cooke, T. E. (1992). The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual reports of Japanese listed corporations. *Accounting and Business Research*, 22(87), 229–237. <https://doi.org/10.1080/00014788.1992.9729440>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hariza, R., Rahmadi, R., & Fahrudin, T. (2025). Penerapan SAK ETAP sebagai strategi peningkatan transparansi laporan keuangan. *Al-Dzahab*. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-dzahab/article/view/5834>
- Hidayat. (2024). Tingkat kepatuhan koperasi terhadap standar akuntansi keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–58.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan entitas privat*. IAI.
- Lewar, S. E., Sanga, K. P., & Dilliana, S. M. (2025). The influence of financial information systems in credit cooperatives on the quality of financial reports. *Neo Journal of Economy*. <https://internationalpublisher.id>
- Lutfillah, N. Q., & Syahida, S. (2026). Financial reporting and accountability practices of sharia cooperative. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://jurnal.fordebi.org/index.php/home/article/view/377>
- Rahmawati. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pada koperasi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(3), 201–215.
- Rosyidah, S. (2025). Perkembangan dan implementasi akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica*. <https://jurnal.bsi.ac.id>
- Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri dalam mendorong inklusi keuangan syariah non-bank. *Jurnal At-Tamwil*. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.